

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini masih dihadapkan pada persoalan *degradasi* moral di hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Berawal dari krisis karakter anak bangsa yang semakin terpuruk sehingga menimbulkan rasa keprihatinan terhadap kondisi karakter (nilai-nilai luhur) anak bangsa yang semakin hari semakin hancur, hingga saat ini telah runtuh. Runtuhnya karakter baik (nilai-nilai luhur) bangsa tersebut telah mengundang berbagai bencana musibah, keterpurukan yang meluas sampai merambah tantangan dan ranah pendidikan, sosial budaya, kemanusiaan dan keagamaan, tak terhindarkan lagi telah merusak hidup dan sendi-sendi kehidupan bangsa. Salah satu problematika bangsa yang terjadi dewasa ini yang sangat dikhawatirkan adalah runtuhnya nilai-nilai karakter (moral/akhlak) di kalangan peserta didik seperti kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh ketidakefektifan penanaman nilai-nilai karakter baik bahkan sebagian sudah meniadakan lagi mata ajar tentang nilai-nilai karakter/moral di lingkungan sekolah baik secara formal maupun non formal. Hasil penelitian Muslich (2011, hlm. 17) menunjukkan bahwa

Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap/nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan sangat meremehkan mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa.

Kondisi ketidakjujuran dan terjadinya dekadensi karakter di kalangan peserta didik ini menunjukkan perilaku tidak terpuji dan tidak menghargai nilai-nilai luhur bangsa, mulai memudar seiring perubahan karakter negatif yang menerpa para peserta didik. Pembangunan karakter bangsa khususnya karakter peserta didik di sekolah sekarang telah menjadi fokus perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah mencanangkan sebuah *Grand Design* pembangunan karakter bangsa yang diimplementasikan dalam [Kurikulum 2013](#) bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pencanangan Gerakan Nasional membangun karakter tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui instansi/dinas pendidikan terkait khususnya satuan pendidikan (sekolah), para praktisi pendidikan dan guru-guru di sekolah. Bahkan lingkup keluarga merupakan bagian dari masyarakat terkecil dalam rangka membangun pondasi awal karakter peserta didik yang menentukan ke arah mana akan dibawa perubahan nasib generasi bangsa.

Pentingnya karakter baik yang harus dimiliki oleh seseorang juga tersirat jelas pada pendapat yang dikemukakan oleh Hakim Learned Had ( dalam Budimasyah, 2010 hal. 33) bahwa karakter baik individu atau seorang warga negara merupakan hal penting yang harus dimiliki karena ketika karakter tersebut masih ada dalam diri warga negara maka sesungguhnya tidak dibutuhkan suatu konstitusi, hukum, pengadilan untuk menjaganya. Sebaliknya, jika karakter tersebut telah sirna dalam diri individu maka tidak akan ada konstitusi, hukum ataupun pengadilan yang mampu menyelamatkan.

Dekadensi karakter (nilai-nilai luhur) ternyata telah menyentuh dunia pendidikan, sungguh memperhatikan sekali menyaksikan betapa merosotnya karakter baik (nilai-nilai luhur) kebanyakan remaja khususnya peserta didik, orang-orang yang peduli terhadap karakter, suaranya nyaris tak terdengar, padahal betapa dahsyatnya serbuan berbagai ajaran, budaya atau pengaruh luar (*westernisasi*) yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai ketimuran telah melanda sistem tata nilai para peserta didik di sekolah yang berada di kota-kota besar hingga menjamah ke pelosok desa. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik melakukan berbagai tindakan negatif (perilaku-perilaku menyimpang/asusila) atau memperagakan perilaku

yang tidak sesuai dengan norma, agama, budaya dan kepribadian nenek moyang kita yang sangat menjunjung tinggi kesopanan dan kesantunan. Tidak bisa dipungkiri lagi, telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan sekaligus ada yang hilang dari sistem karakter baik (nilai-nilai luhur) peserta didik saat ini yang diajarkan di sekolah, tidak bisa menyalahkan guru dan peserta didik saja tetapi harus ada upaya dan usaha kerja keras semua pihak dalam mengintrospeksi diri, bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan gerakan membangun karakter (*Character Building*) dan gerakan moral (*moral action*) untuk sebuah perubahan karakter peserta didik sekarang dan di masa depan.

Lembaga pendidikan seperti sekolah tidak terlepas daripada tuduhan masyarakat bahwa kenakalan remaja yang menimpa peserta didik adalah salah satu bentuk kemerosotan karakter dan kegagalan lembaga pendidikan untuk membentuk nilai moral, watak dan prilaku peserta didik yang beradab dan bermartabat. Apalagi guru Agama dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), akan selalu menjadi sasaran ujung tombak dan harapan berubahnya karakter peserta didik. Selaku pendidik dan pengajar telah dituding gagal membentuk karakter (nilai-nilai luhur) peserta didik, bahkan juga muncul hujatan dari orang-orang/pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan inilah, seharusnya menjadikan sekolah yang dipercayakan sebagai bagian dari lembaga pendidikan telah mengambil porsi penuh untuk ikut andil dalam upaya membangun karakter peserta didiknya yang beradab dan bermartabat melalui implementasi penguatan karakter peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pendidikan karakter telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, yang memiliki misi pembangunan nasional untuk memposisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam rancangan pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007), yaitu "terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEK". Selain itu, Tujuan pendidikan sebagai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003 adalah "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab". Selain itu pendidikan karakter telah diatur dalam Perpres No 87 tahun 2017 "PPK, menurut Perpres ini, memiliki tujuan: a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab".

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengemban misi menjadikan siswa sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis dan religius. Hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar mampu melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi serta bertanggung jawab berupaya membangun kehidupan bangsa (Zuriah, 2007: 150). Dengan demikian, PPKn memiliki posisi strategis dalam mengembangkan karakter siswa serta memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas warga negara (Samsuri, 2011: 20). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai fokus pengembangan utama dalam pembentukan karakter siswa selain pendidikan agama yang juga memiliki prioritas

Mengajarkan dan menanamkan karakter baik (nilai-nilai luhur) pada diri peserta didik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun karakter di sekolah merupakan salah satu prioritas (agenda utama) yang esensial dan urgens dalam kehidupan individu untuk saat ini dan yang akan datang, dengan alasan yaitu; *Pertama*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

merupakan ruh/jiwanya pendidikan karena itu jika dalam implementasi penguatan karakter baik (nilai-nilai luhur) tidak sepenuhnya terintegrasi dalam setiap mata pelajaran bahkan kurang diperhatikan atau diresonansi maka penanaman karakter baik akan terabaikan begitu saja, dengan ini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menjadi sasaran dan target utama untuk membangun karakter peserta didik. *Kedua*, karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku, baik atau buruk yang mencirikan identitas atau jati diri seseorang secara personal yang melekat serta menonjol pada dirinya. Alasan ini diperkuat oleh Imam Ghazali (dalam Kemendiknas, 2011, hlm. 10) menganggap bahwa “karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam dirinya”. *Ketiga*, karakter seseorang tidak mutlak bisa berubah-ubah sesuai kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Sesuai pendapat Koesoema (dalam Kemendiknas, 2011, hlm.11) “Karakter sama dengan kepribadian dianggap sebagai “ciri”, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir”.

*Keempat*, karakter dapat diarahkan ke hal-hal yang positif dan keberadaban sesuai keinginan seseorang tersebut. Wuryadi (dalam Kemendiknas, 2011, hlm. 13) “Manusia pada dasarnya baik secara individu dan kelompok, memiliki apa yang jadi penentu watak dan karakternya yaitu dasar dan ajar”. Ia jelaskan lagi, dasar dapat dilihat sebagai apa yang disebut modal biologis (genetik) atau hasil pengalaman yang sudah dimiliki (teori konstruktivisme), sedangkan ajar adalah kondisi yang sifatnya diperoleh dari rangkaian pendidikan atau perubahan yang direncanakan atau diprogram.

Dari keempat alasan tersebut adalah sebagai modal investasi dan upaya penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang berkepribadian kuat (karakter kuat) dan bernafaskan pada nilai-nilai agama untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin diri, motivasi belajar, usaha melestarikan dan mempertahankan serta pengkajian terhadap nilai-nilai ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah Pancasila itu sendiri yang perlu dikembangkan dan dilestarikan oleh peserta didik sebagai generasi penerus agar bangsa Indonesia dapat bangkit dari semua kondisi keterbelakangan dan keterpurukan. Kondisi seperti inilah lembaga pendidikan perlu mengupayakan agar peserta didik mampu menemukan nilai dirinya tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup (berlaku) dan berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, pendidikan karakter yang dimiliki seseorang sangat memberikan pengaruh yang luar biasa pada kelompok dimana dia berada, baik itu kelompok kecil seperti keluarga, hingga kelompok besar seperti masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cicero (dalam Lickona, 2013 hal. 12) yang menyatakan bahwa “*Within the character of the citizen, lies the welfare of the nation.*” Hal ini jelas menunjukkan bahwa kumpulan karakter dari individu adalah yang akan mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa. Karakter merupakan kekuatan dan kemudian yang akan mengendalikan kehidupan bangsa agar tidak terombang ambing. Jika warga suatu negara memiliki karakter yang baik maka masa depan negara tersebut kemungkinan besar akan baik. Begitu pun sebaliknya, jika warga suatu negara menunjukkan karakter yang tidak baik maka kehidupan negara tersebut kemungkinan besar juga tidak baik.

Sejalan dengan Zuchdi, (dalam Dirjen Pendas Kemendiknas, 2011, hlm.6) ada enam krisis moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain adalah krisis kejujuran, krisis tanggung jawab, tidak berpikirl jauh ke depan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, krisis keadilan. Jadi, berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa penyebab terjadinya krisis karakter sangat bersifat multidimensi, sehingga dibutuhkan solusi atas masalah krisis karakter ini secara struktural, yang lebih khusus lagi adalah peran pendidikan dalam implementasi kurikulum sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan karakter peserta didik.

Di sisi lain, praktik pendidikan di sekolah yang cenderung terfokus pada pengembangan aspek kognitif (*hard skills*) dan sedikit mengabaikan aspek afektif (*soft skills*) sebagai unsur utama dalam membangun karakter peserta didik, membuat nilai-nilai positif pendidikan belum optimal tercapai, misalnya persoalan kurangnya pendidikan karakter juga terlihat dikalangan remaja yang sangat memerhatikan. Di Samarinda contohnya, pada tahun 2013 dari 37 jenis tindak kejahatan yang dihimpun oleh Polresta Samarinda, 12 diantaranya dilakukan oleh remaja. Kejahatan tersebut meliputi pemerkosaan, perzinahan, cabul, penganiayaan ringan dan berat, pengeroyokan, pencurian, dan membawa lari anak perempuan orang (Kompasiana.com, diunduh 12/04/2017). Kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas

semakin tak terkendali. Berdasarkan data penelitian pada tahun 2005-2006 di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar, masih berkisar 47,54 persen remaja yang mengaku melakukan hubungan seks sebelum menikah. Namun survei terakhir tahun 2008 meningkat menjadi 63 persen. (makassar.tribunnews.com, diunduh 12/04/2017).

Hal tersebut tidak berbeda seperti yang terjadi di daerah pedesaan. Kebanyakan orang tua sudah merasa cukup dalam penjagaan di lingkungan keluarga, masyarakat hanya dapat menyaksikan tanpa ada respon yang begitu kuat untuk merubah hal tersebut. Sekolah rata-rata memutuskan untuk menghentikan siswa tersebut karena sudah melanggar norma kesusilaan, akibatnya pernikahan di usia dini meningkat. Narkoba dan minuman keras menjadi konsumsi generasi muda yang tak terbendung, ditambah maraknya minuman keras oplosan. Hiburan malam mejadi pusat berkumpulnya para pencita minuman keras dan pengguna narkoba.

Selain itu contekan massal menjadi warna baru dalam pendidikan Indonesia sejak diberlakukan Ujian Nasional oleh pemerintah. Dunia pendidikan menjadi tercoreng akibat kepentingan kelompok tertentu yang mengatasnamakan perbaikan pendidikan. Padahal jelas tujuan pendidikan nasional bukan untuk mengejar nilai berupa angka, namun bertujuan untuk merubah perilaku menuju pribadi yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Kurikulum jelas menginstruksikan untuk penyesuaian materi ajar dengan kondisi peserta didik. Namun, pada prakteknya muncul Ujian Nasional yang menginginkan hasil yang berstandar sama seluruh Indonesia. Siswa yang di Jakarta sama dengan standar yang tinggal di pelosok Papua. Guru menjadi tertekan karena harus memenuhi standar dari pusat yang berbeda dengan standar pengajaran di kelas. Akhirnya guru harus mengambil jalan pintas dengan membantu siswa untuk mengerjakan soal ujian. Kewibawaan guru dihadapan siswa kemudian menurun serta sekolah berubah disorientasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suryadi (dalam Wuryandani dkk, 2011, hal.176) yang menjelaskan bahwa: Penyebab utama terjadinya krisis moral dan karakter dikalangan peserta didik, lulusan, pendidik, bahkan pengelola pendidik, adalah terjadinya dikotomisasi, yaitu pemisahan secara tegas antara pendidikan intelektual disatu pihak dan pendidikan nilai karakter dilain pihak.

Seluruh permasalahan di atas hanya menggambarkan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Hal-hal tersebut dilatar belakangi karena kurangnya rasa Integritas baik untuk diri sendiri, sesama/orang lain, lingkungan Tuhan/Agama dan juga negaranya. Semua bentuk penyimpangan yang diuraikan menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindakan yang merusak dirinya sendiri karena tidak memiliki rasa Integritas terhadap dirinya, sehingga diperlukannya pembinaan secara intensif dan berkelanjutan di luar jam pelajaran pendidikan agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti pelajaran tambahan yang dilakukan baik di dalam kelas maupun diluar kelas atau diluar sekolah. Bahkan, diperlukannya penginternalisasian nilai-nilai karakter ke dalam semua mata pelajaran, adanya kerjasama yang harmonis dan interaktif diantara para warga sekolah dan para tenaga kependidikan yang ada di dalamnya sangat mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan karakter peserta didik.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu solusi perbaikan karakter yang tepat dalam menghadapi persoalan tersebut. Perlu ada kerja sama seluruh elemen dari individu, kelurga, sekolah, masyarakat, LSM, lembaga sosial, maupun pemerintah guna memperbaiki keadaan tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2013) bahwa berhasil tidaknya pembentuk kepribadian peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia dan berbudi pekerti luhur sangat tergantung pada niat, tekad dan kesungguhan, dan keikhlasan dari semua pihak: kepala sekolah, guru, dan *stakeholder* lainnya ( orang tua, masyarakat, dan pemerintah).

Pendidikan adalah pusat perubahan dalam berbagai macam persoalan tersebut. Setiap generasi yang dididik dipersiapkan untuk menciptakan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Perlu orang-orang yang berkompeten dan cakap untuk mempersiapkan hal tersebut. Mendidik bukan hanya mentransfer ilmu dari guru ke anak didik, Namun bagaimana bisa membentuk pribadi yang baik dan berkarakter sesuai dengan potensi yang dimiliki anak didik. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak instansi pendidikan mengeluarkan lulusan yang berkompeten, namun tidak berkarakter. Lulusan hanya berstandarkan nilai angka, bukan berdasarkan kematangan pribadi dalam menjalani kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan dunia kerja. Jika hal ini dikaitkan dengan pemenuhan standar pendidikan karakter bangsa, maka hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk mencapai hal tersebut. Upaya memasukkan nilai-nilai karakter bangsa pada setiap mata pelajaran menjadi

salah satu jalan yang ditempuh. Namun hal ini belum memperlihatkan perubahan yang signifikan pada peserta didik. Masih banyaknya tindak kriminal yang dilakukan para pemuda yang masih jauh dari nilai-nilai karakter.

Pendidikan karakter menjadi solusi terdepan dalam mengatasi permasalahan bangsa. Seperti yang diamanatkan oleh presiden pertama kita Ir Soekarno (Manullang, 2013) “bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan membangun karakter (*character building*). Karena *character building* inilah yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat.

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi diberbagai pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusakan, korupsi yang telah merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling menyalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa (Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter 2010-2025).

Pendidikan karakter telah dilaksanakan di seluruh sekolah tetapi implementasi pendidikan karakter belum terlaksana seutuhnya hal tersebut berbeda dengan yang telah dilaksanakan di Sekolah Islam Athirah Makassar yang sangat menekankan tentang pendidikan karakter, mengintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik, sehingga ketika pendidikan karakter telah dilaksanakan secara menyeluruh yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan karakter pada peserta didik dan ditekankan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai bagian dari sebuah sistem pendidikan nasional dituntut untuk mengembangkan karakter peserta didiknya melalui berbagai kegiatan pembiasaan-pembiasaan (*habituation*), keteladanan, dan pengkondisian suasana religius serta harmonis dalam melakukan tindakan positif. Berusaha, berkomitmen untuk selalu melakukan segala bentuk kebaikan dan merasa benci, bersalah kalau melakukan kesalahan atau keburukan tersebut.

Beberapa kasus yang telah diurai menggambarkan karakter umum peserta didik di SMP, akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di SMP Islam Athirah Makassar para peserta didik dengan penuh konsisten dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas sesuai dengan visi misi sekolah tersebut yang merupakan salah satu sekolah dalam implementasi penguatan pendidikan karakter khususnya karakter integritas.

SMP Islam Athirah Makassar sebagai salah satu sekolah Islam memiliki komitmen yang tinggi untuk memperbaiki permasalahan yang mendasar yang masih muncul ditengah masyarakat Indonesia melalui pendekatan yang Islam, berjiwa nasional, dan berwawasan global, dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah tersebut tidak pernah terlepas dari ketiga Aspek tersebut. Hal ini SMP Islam Athirah Makassar memiliki kesamaan dengan pendidikan nilai dan karakter telah di tuangkan dalam Perpres No. 87 tahun 2017 bahkan menjadi bahan acuan dalam penyusunan PPK dalam Mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu membekali peserta didik dengan kecerdasan spritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual, dengan menggunakan kurikulum 2013 namun tak terlepas dari ciri khas Athirah yaitu Kerja ibadah, Apresiasi pelanggan, Lebih cepat, Lebih baik, dan Aktif bersama.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar sebagaimana dijabarkan dalam rumusan masalah dibawah ini:

**Sukmawati, 2018**

**IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER INTEGRITAS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Bagaimana perencanaan implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar?
- 2) Bagaimana pelaksanaan implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar?
- 3) Bagaimana evaluasi implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar?
- 4) Bagaimana kendala-kendala dan upaya penyelesaian kendala-kendala implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar?
- 5) Bagaimana sikap Integritas siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan diluar kelas?

### 1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yaitu

- 1) Implementasi dilihat pada saat proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dan ditujukan pada guru, siswa, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Islam Athirah Makassar
- 2) Pendidikan karakter difokuskan untuk mengukur Integritas siswa
- 3) Integritas yang akan diteliti yaitu kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, ketauladanan, dan menghargai martabat individu.
- 4) Penelitian dilakukan di SMP Islam Athirah Makassar

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar yang memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1.4.1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan umum peneliti melakukan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

- 1) Perencanaan implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar.
- 2) Pelaksanaan implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar.
- 3) Evaluasi implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar.
- 4) Kendala-kendala dan upaya penyelesaian kendala-kendala implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Athirah Makassar.
- 5) Sikap Integritas siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan diluar kelas.

## 1.5. Manfaat Penelitian

### 1.5.1. Segi teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan, menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada SMP Islam Athirah Makassar, guna memberikan pengembangan bagi keilmuan PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam lingkup nonformal.

### 1.5.2. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai implementasi pendidikan karakter secara menyeluruh baik di sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga maupun bangsa dan negara. Sehingga Peraturan Presiden No 87 tahun 2017 serta aturan pendukung lain dapat terlaksana dengan menyeluruh

### 1.5.3. Segi Praksis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a) Para pengembang kurikulum PPKn, terutama tambahan muatan isi pendidikan karakter dengan menjalin keterpaduan konsep dan praktek pendidikan karakter pada peserta didik dan masyarakat.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan acuan dalam implementasi penguatan pendidikan karakter diseluruh sekolah di Indonesia.
- c) Peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar dikembangkan konsep dan teori lain untuk meningkatkan peran pendidikan bagi karakter warga negara

### 1.5.4. Segi isu serta Aksi Sosial

Secara isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

- a) Pada masyarakat umum, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk mengambil peran aktif dalam upaya implementasi pendidikan karakter dalam masyarakat supaya melahirkan generasi yang berkarakter sebagai masyarakat yang beradab.
- b) Para akademisi, praktisi pendidikan, aktivis lingkungan, dan tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep implementasi pendidikan karakter yang dapat dijadikan contoh secara menyeluruh bukan hanya sekolah-sekolah pilihan akan tetapi mampu diterapkan diseluruh sekolah di Indonesia.
- c) Pejabat pemerintah, terutama Pemerintah (Makassar) Sulawesi Selatan, agar memberikan dukungan baik materiil maupun nonmateriil terhadap program-program yang dapat menunjang pembentukan karakter pada setiap peserta didik, maupun dalam masyarakat.

## 1.6. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini akan disajikan dalam lima bab, sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

**Sukmawati, 2018**

*IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER INTEGRITAS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dipaparkan dalam bab ini. Secara umum, bab ini berisi penjelasan Tinjauan tentang Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tinjauan Pendidikan karakter, Karakter Integritas

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan yang rinci tentang metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan secara rinci hasil peneltian dan dibandingkan dengan kajian pustaka dan metode penelitian dari penelitian terdahulu yang ada di bab-bab sebelumnya

#### **BAB V : KESIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan beberapa saran yang didasarkan pada hasil analisis di bab empat.

#### **2. DAFTAR PUSTAKA**

Pustaka yang relevan dengan penelitian disusun di bagian ini.

#### **3. LAMPIRAN**

Bagian ini menyajikan beberapa lampiran penting yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan di bab pertama ini, kajian pustaka yang komprehensif sangat diperlukan untuk dapat mengeksplorasi pengaruh kepemimpinan partisipatif dan komitmen organisasi terhadap implementasi renstra. Oleh karena itu, bab dua dari tesis ini akan membahas dan menganalisis kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

**Sukmawati, 2018**

*IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER INTEGRITAS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)